



RENCANA KERJA

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jombang

Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Dr. Soetomo No. 15b, Jombang 61400

Telp.(0321) 854101 Fax. (0321) 871333

Email : disperpusip@jombangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Sebagai suatu instrument kebijakan daerah, Rencana Kerja memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, karena selain dapat memberikan arah dalam pelaksanaan kerja, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja itu sendiri. Selain itu Rencana Kerja adalah sebagai acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang selama kurun waktu 1 (satu) Tahun. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menentukan skala kebutuhan yang diproyeksikan secara bertahap setiap tahunnya yang dilaksanakan pada masa sekarang maupun mendatang.

Demikian, semoga Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jombang, 10 Juli 2024

PIH KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN JOMBANG



KOMARIYAH, SH

Pembina

NIP. 19670416 199003 2 014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....	19
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	46
3.3. Program dan Kegiatan.....	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	64
BAB V PENUTUP.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025	35
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Jombang.....	41
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	59
Tabel 4.1	Usulan Program, Kegiatan dan Pendanaan pada Rencana Kerja tahun 2024.....	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 3 tahun (RPD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk jangka 3 tahun (Renstra-PD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Renstra-PD disusun dengan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-PD tersebut, maka PD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan Pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik dalam program dan kegiatan maupun penganggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan penjabaran dari Rencana Strategis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang yang memuat arah kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoprasionalakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang Tahun 2025 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya dalam urusan Perpustakaan dan Kearsipan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2025.

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025.
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
5. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di dalam Urusan Perpustakaan dan Tata Kearsipan.
2. Mewujudkan Kabupaten Jombang yang masyarakatnya gemar membaca dan tertib administrasi kearsipan, .
3. Terlaksananya tugas dan kewajiban serta tanggung jawab di bidangnya masing-masing dengan menyelenggarakan kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana serta fasilitas operasional yang tersedia.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ataupun Lembaga sejenis baik di Lingkup Pemkab Jombang, Pemprov. Jatim dan Tingkat Nasional

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017, penyajian Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerjanya. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang berdasarkan program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023 serta perkiraan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana satuan kerja bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan segala daya yang ada serta mengedepankan konsistensi, efisiensi, produktif dan inovatif. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana organisasi berjalan sesuai pada relnya dan kendala-kendala apa yang dihadapi selama kegiatan berjalan. Evaluasi kinerja tersebut disusun mengacu pada Perubahan Rencana Strategis yang telah dibuat dan pada hasil laporan kinerja tahun 2023 serta perkiraan capaian kinerja sesuai target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2024. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang pada tahun 2025 sudah sesuai dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Permendagri nomor 90 tahun 2019 yang merupakan perwujudan sasaran pada Perubahan Renstra tersebut direalisasikan dalam 4 program, 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada sub bab ini akan memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang tahun 2023 (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024 (n-1), yang mengacu pada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan. Yang selanjutnya akan dikaitkan dengan pencapaian Target Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024. Sedangkan Capaian kinerja Tahun 2023 (n-2) mengacu pada laporan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tribulan IV tahun 2023, sedangkan untuk prakiraan capaian kinerja pada tahun 2024 berdasarkan target yang dipasang pada Renja tahun 2024. laporan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tribulan IV tahun 2023 dan juga prakiraan capaian kinerja tahun 2024 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perpustakaan dan kearsipan.

Untuk mengetahui hasil capaian kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023 dan juga capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat dari tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai dengan Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)			
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.399.692.740		3.953.312.794		4.799.022.460		4.496.437.581				5.083.286.150		5.083.286.150		
2.23	URUSAN PERPUSTAKAAN			655.881.950				512.259.474		502.510.180								
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan	9,70 %	655.881.950	n/a	441.497.390	n/a	512.259.474	n/a	502.510.180	n/a	98,10 %	9,70 %	435.025.306	9,70 %	435.025.306	100%	100%
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan berotomasi	50 %	516.935.500	n/a	407.203.160	n/a	341.851.024	n/a	338.806.180	n/a	99,74 %	50 %	302.153.406	50 %	302.153.406	100%	100%
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenanganya	10 Perpu staka an	256.056.700	n/a	n/a	10 Perpu staka an	161.954.700	10 perpus takaan	161.531.300	100 %	99,74 %	3 Perpust akaan	169.559.088	3 Perpust akaan	169.559.088	100%	100%
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Dengan Standart Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40 perpu staka an	80.878.800	n/a	n/a	40 perpu staka an	16.470.800	40 perpus takaan	16.067.200	100 %	97,55 %	47 perpu staka an	24.932.512	47 perpu staka an	24.932.512	100%	100%
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 ekse mplar	180.000.000	n/a	n/a	1500 eksem plar	163.425.524	1766 eksem plar	161.207.684	117,73 %	98,64 %	500 eksem plar	107.661.806	500 eksem plar	107.661.806	100%	100%
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penduduk yang Teredukasi Gemar Membaca	7,00 %	138.946.450	n/a	134.134.050	n/a	170.408.450	n/a	163.704.000	105,51 %	96,07 %	7 %	132.871.900	7,00 %	132.871.900	100%	100%
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran membaca dan Literasi pada satuan pendidikan	232 lokus	93.043.450	n/a	n/a	200 lokus	112.353.450	207 lokus	109.050.500	103,50 %	97,0 6%	232 lokus	56.353.800	232 lokus	56.353.800	100%	100%
2.23.02.2.02.01	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 perpu staka an	45.903.000	n/a	n/a	3 perpust akaan	58.055.000	3 perpus takaan	54.653.500	100 %	94,14 %	3 perpust akaan	76.518.100	3 perpust akaan	76.518.100	100%	100%

2.18.	URUSAN KEARSIPAN																	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang dilakukan Pengawasan Kearsipan	100 %	405.892.100	n/a	162.097.100	n/a	442.826.800	n/a	423.892.362	100 %	95,72 %	100 %	311.593.675	100 %	311.593.675	100%	100%
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota	Jumlah PD yang membuat daftar arsip dinamis.	5 OPD	364.451.200	n/a	156.907.100	5 OPD	431.610.300	n/a	413.068.312	100 %	95,70 %	5 OPD	270.019.425	5 OPD	270.019.425	100%	100%
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	300 berkas	260.605.700	n/a	n/a	300 berkas	296.310.100	3546 berkas	281.797.212	100 %	95,10 %	300 berkas	194.410.600	300 berkas	194.410.600	100%	100%
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	10284 berkas	103.845.500	n/a	n/a	9384 berkas	135.300.200	9384 berkas	131.271.100	100 %	97,02 %	9684 berkas	75.608.825	9684 berkas	75.608.825	100%	100 %
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Tingkat Daerah Kabupaten yang Diakses dalam SIKN Melalui JIKN sesuai dengan ketentuan	3,28 %	41.440.900	6,56 %	5.190.000	9,84 %	11.216.500	9,84 %	10.824.050	100 %	96,50 %	3,28 %	41.574.250	3,28 %	41.574.250	100%	100%
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/ Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 pengguna	41.440.900	n/a	n/a	244 pengguna	11.216.500	462 pengguna	10.824.050	189,34 %	96,50 %	10 pengguna	41.574.250	10 pengguna	41.574.250	100%	100%
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase unit kearsipan yang menjamin keselamatan arsip	1,67 %	39.146.000	1,08 %	n/a	1,63 %	5.237.300	1,63 %	5.068.800	100 %	96,78 %	1,67 %	22.741.000	1,67 %	22.741.000	100%	100%
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang teralih media	100 %	39.146.000	66,67 %	n/a	4,76 %	5.237.300	4,76 %	5.068.800	100 %	96,78 %	100 %	22.741.000	100 %	22.741.000	100%	100%
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 arsip	39.146.000	n/a	n/a	2 arsip	5.237.300	2 arsip	5.068.800	100 %	96,78 %	10 arsip	22.741.000	10 arsip	22.741.000	100%	100%
2.24.01	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100 %	4.298.772.690	100 %	3.349.718.304	100 %	3.838.698.886	100 %	3.564.966.235	100 %	92,87 %	100 %	4.313.926.169	100 %	4.313.926.169	100%	100%
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100 %	29.000.000	100 %	2.559.300	100 %	10.797.050	100 %	10.791.350	100 %	99,95 %	100 %	31.028.400	100 %	31.028.400	100%	100%
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	12.000.000	n/a	n/a	3 Dokumen	3.142.800	3 Dokumen	3.137.400	100 %	99,83 %	3 Dokumen	14.658.600	3 Dokumen	14.658.600	100%	100%
2.24.01.2.01.06	koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	17.000.000	n/a	n/a	5 Laporan	7.654.250	5 Laporan	7.653.950	100 %	100 %	5 Laporan	16.369.800	5 Laporan	16.369.800	100%	100%
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	100 %	3.646.980.690	100 %	2.867.411.893	100 %	3.071.800.200	100 %	2.815.010.642	100 %	91,64 %	100 %	3.432.695.441	100 %	3.432.695.441	100%	100%
		Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Sesuai Aturan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	100 %		100 %		100 %		100%
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 orang/bulan	3.528.906.690	n/a	n/a	22 orang/bulan	2.987.591.500	20 orang/bulan	2.730.894.992	100	91,41	22 orang/bulan	3.309.855.191	22 orang/bulan	3.309.855.191	100%	100%

											%	%						
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	114.074.000	n/a	n/a	12 dokumen	83.184.000	12 dokumen	83.184.000	100 %	100 %	12 dokumen	120.840.000	12 dokumen	120.840.000	100%	100%
2.24.01.2.02.06	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang diverifikasi	1 laporan	2.000.000	n/a	n/a	1 laporan	577.400	1 laporan	488.200	100 %	84,55 %	1 laporan	1.000.150	1 laporan	1.000.150	100%	100%
2.24.01.2.02.07	Koor dinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17 Laporan	2.000.000	n/a	n/a	17 Laporan	447.300	17 laporan	443.450	100 %	99,14 %	17 Laporan	1.000.100	17 Laporan	1.000.100	100%	100%
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 %	12.000.000	100 %	6.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	12.000.000	100 %	12.000.000	100%	100%
2.24.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta atribut kelengkapannya	20 paket	12.000.000	100 %	6.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20 paket	12.000.000	20 paket	12.000.000	n/a	n/a
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	244.352.000	100 %	101.192.308	100 %	185.993.100	100 %	182.853.816	100 %	98,31 %	100 %	204.098.050	100 %	204.098.050	100%	100%
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	7 paket	7.000.000	n/a	n/a	7 paket	3.299.000	7 paket	3.289.266	100 %	99,70 %	13 paket	4.996.100	13 paket	4.996.100	100 %	100%
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	25.000.000	n/a	n/a	50 paket	17.942.500	50 paket	17.934.450	100 %	99,96 %	57 paket	14.963.500	57 paket	14.963.500	100%	100%
2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 paket	25.000.000	n/a	n/a	25 paket	13.059.200	25 paket	13.054.000	100 %	99,96 %	33 paket	13.327.700	33 paket	13.327.700	100%	100%
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	115.000.000	n/a	n/a	4 paket	86.250.400	4 paket	83.176.300	100 %	96,44 %	5 paket	90.494.400	5 paket	90.494.400	100%	100%
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	9.000.000	n/a	n/a	2 paket	7.858.000	2 paket	7.815.800	100 %	99,46 %	2 paket	10.278.350	2 paket	10.278.350	100%	100%
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	3.352.000	n/a	n/a	1 dokumen	2.352.000	1 dokumen	2.352.000	100 %	100 %	1 dokumen	2.352.000	1 dokumen	2.352.000	100%	100%
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	60.000.000	n/a	n/a	14 laporan	55.232.000	14 laporan	55.232.000	100 %	100 %	24 laporan	67.686.000	24 laporan	67.686.000	100%	100%
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	50.000.000	100 %	143.327.000	100 %	299.643.692	100 %	296.937.200	100 %	99,10 %	100 %	157.662.910	100 %	157.662.910	100%	100%
2.24.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	n/a	n/a	3 Unit	299.643.692	132 unit	296.937.200	100 %	99,10 %	80 Unit	157.662.910	80 Unit	157.662.910	100%	100%

2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	160.440.000	100 %	120.610.627	100 %	137.640.000	100 %	127.914.627	100 %	92,93 %	100 %	196.928.400	100 %	196.928.400	100%	100%
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	71.000.000	n/a	n/a	12 laporan	58.200.000	12 laporan	49.599.176	100 %	85,22 %	12 laporan	91.200.000	12 laporan	91.200.000	100%	100%
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	89.440.000	n/a	n/a	12 laporan	79.440.000	12 laporan	78.315.451	100 %	98,58 %	12 laporan	105.728.400	12 laporan	105.728.400	100%	100%
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	156.000.000	100 %	108.617.176	100 %	132.824.844	100 %	131.458.600	100 %	98,97 %	100 %	279.512.968	100 %	279.512.968	100%	100%
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.000.000	n/a	n/a	1 unit	35.711.800	1 unit	35.379.500	100 %	99,07 %	1 unit	40.110.088	1 unit	40.110.088	100%	100%
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	60.000.000	n/a	n/a	12 unit	46.414.044	12 unit	45.401.700	100 %	97,82 %	12 unit	171.000.480	12 unit	171.000.480	100%	100%
2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit	36.000.000	n/a	n/a	3 unit	32.309.000	3 unit	32.297.400	100 %	99,96 %	3 unit	48.078.400	3 unit	48.078.400	100%	100%
2.24.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 unit	20.000.000	n/a	n/a	27 unit	18.390.000	27 unit	18.380.000	100 %	99,95 %	27 unit	20.324.000	27 unit	20.324.000	100%	100%

Hasil Evaluasi berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, 2023 dan 2024, Nomenkatur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan masih relatif sama akan tetapi yang berbeda adalah indikator sub kegiatan pada tahun 2022 dan tahun 2023, pada tahun 2023 sudah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050/5889 sehingga tidak dapat disandingkan dengan indikator pada sub kegiatan di tahun 2022 dan 2023. Sedangkan pada indikator sub kegiatan tahun 2023 dan 2024 sudah sama karena sudah menggunakan Kepmendagri Nomor 050/5889, akan tetapi indikator pada program dan kegiatan tahun 2023 dan 2024 ada yang sama dan bisa disandingkan dan ada yang tidak sama sehingga tidak dapat disandingkan, hal ini dikarenakan indikator tahun 2023 masih berdasarkan Renstra Dinas perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2028-2023 sedangkan untuk indikator Program dan Kegiatan tahun 2024 sudah berdasarkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026.

Perkiraan Rencana Kerja sampai dengan perkiraan akhir tahun Tahun 2023 dari Tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan Realisasi Anggaran mencapai 93,69% yang diperoleh dari Target Kinerja Anggaran Rp. 4.799.022.460,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.496.437.581,-. Sedangkan pada tahun 2024 masih berjalan sampai dengan tribulan II, akan tetapi berdasarkan capaian kinerjanya dapat dilihat bahwa semua kegiatan yang direncanakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari rencana aksi yang dilaksanakan tepat waktu. Jika diasumsikan Target pada rencana kerja tahun 2024 tercapai semuanya, maka capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra pada akhir 2024 akan tercapai dengan baik, sehingga berdasarkan tabel 2.1 dapat kami sajikan :

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang sudah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
3. Capaian kinerja sudah tercapai sesuai yang direncanakan berdasarkan target kinerja program dan kegiatan tahun 2023, hal ini disebabkan karena kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi begitu juga dengan tahun 2024;

Pada Tabel 2.1. tersebut kami menyajikan target renstra sampai dengan tahun 2026 (Renstra 2024-2026), Berikut kami sajikan analisis hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022,

2023 (Renstra 2018-2023) dan perkiraan pencapaian Renstra Perangkat daerah sampai dengan Tahun 2024 (Renstra 2024-2026) adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan;

Pada tahun 2022 dan 2023 kinerja program, kegiatan dan Sub kegiatan tidak dapat disandingkan dengan indikator Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Tahun 2024 dikarenakan adanya perbedaan indikator. Tahun 2022 hanya kami sajikan hasil pencapaian kinerja anggarannya saja, program Pembinaan Perpustakaan dengan pagu anggaran Rp. 446.606.000,- terealisasi Rp. 441.497.390 sehingga dapat dihitung tingkat capaian anggaran sebesar 98,86%. Sedangkan Program Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp. 512.259.474,- terealisasi Rp. 502.510.180,- tingkat capaian anggaran 98,10%. Dan pada tahun 2024 Pagu anggaran sebesar Rp. 435.025.306,- diasumsikan terealisasi 100%. Begitu juga untuk realisasi kinerja diasumsikan capaian kinerja anggaran tercapai 100% sebagaimana yang direncanakan. Program Pembinaan Perpustakaan ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan :

a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten/kota. Pada Kegiatan ini terdapat 4(empat) sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik, Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota.
- Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten /kota sesuai dengan standart nasional perpustakaan.

b. Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.

Pada Kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat.
- Pengembangan literasi berbasis inklusi social.

2. Program Pengelolaan Arsip;

Pada tahun 2022 dan 2023 kinerja program, kegiatan dan Sub kegiatan tidak dapat disandingkan dengan indikator Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Tahun 2024 dikarenakan adanya perbedaan indikator. Tahun 2022 hanya kami sajikan hasil pencapaian kinerja anggarannya saja, Program Pengelolaan Arsip dengan pagu anggaran Rp. 162.143.700,- terealisasi Rp. 162.097.100,- sehingga dapat dihitung tingkat capaian anggaran sebesar

99,97%. Sedangkan Program Pengelolaan Arsip pada tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp. 442.826.800,- terealisasi Rp. 423.892.362,- tingkat capaian anggaran 95,72%. Dan pada tahun 2024 Pagu anggaran sebesar Rp. 311.593.675,- diasumsikan terealisasi 100%. Begitu juga untuk realisasi kinerja diasumsikan capaian kinerja anggaran tercapai 100% sebagaimana yang direncanakan. Program Pengelolaan Arsip ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan :

1. Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota. Pada Kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis.
- Pemeliharaan dan penyusutan arsip.

2. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN.

3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;

Pada Tahun Anggaran 2022 Program perlindungan dan penyelamatan Arsip tidak didukung oleh anggaran akan tetapi target kinerja tetap dilaksanakan karenakan merupakan tupoksi. Sedangkan pada Tahun 2023 pagu anggaran sebesar Rp. 5.237.300,- Terealisasi Rp. 5.068.800 sehingga dapat dihitung capaian anggaran sebesar 95,72%. Dan pada tahun 2024 Pagu anggaran sebesar Rp. 22.741.000,- diasumsikan terealisasi 100%. Begitu juga untuk realisasi kinerja diasumsikan capaian kinerja anggaran tercapai 100% sebagaimana yang direncanakan. Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan:

- Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator program Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur pada tahun 2022 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.510.180.190,- terealisasi sebesar Rp. 3.349.718.304 sehingga dapat dihitung capaian anggaran sebesar 95,43%. Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.838.698.886 terealisasi Rp. 3.564.966.235,- Capaian kinerja 92,87%. Dan pada tahun 2024 Pagu anggaran sebesar Rp. 4.313.926.169,- diasumsikan terealisasi 100%. Begitu juga untuk realisasi kinerja diasumsikan capaian kinerja anggaran tercapai 100% sebagaimana yang

direncanakan. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota didukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 20 sub kegiatan. Pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota ini sudah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yang ada pada anggaran kas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana Urusan Perpustakaan dan pelaksanaa urusan Kearsipan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Mekanisme Kelembagaan

Kelembagaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang berdasarkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2. Mekanisme Pelaksanaan

Seiring diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme pelaksanaan Perpustakaan dan Kearsipan dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif (*Participatory planning*), bahwa perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat berperan penting untuk mendukung pendidikan seumur hidup (*long Life Education*) menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis dan inovatif yang berbasis pada budaya keilmuan dan pembangunan kearsipan modern yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sekaligus dikondisikan untuk menjawab agenda pembangunan nasional yang berkaitan dengan kearsipan. Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : Politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui rapat koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi dan Kota/kabupaten.

3. Hasil Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan, antara lain:

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah terkait urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan;
- b. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
- c. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023;
- d. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- e. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024;
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024;
- g. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perbaikan mutu pelayanan urusan perpustakaan dan kearsipan, mulai dari menampung aspirasi dan kebutuhan pengguna/pengunjung hingga menuangkan dalam perencanaan program dan kegiatan rencana kerja;
- h. Evaluasi dan rewiu pelaksanaan perencanaan baik perencanaan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan jangka menengah maupun tahunan melalui Rapat kerja dan rapat koordinasi dengan pusat, Propinsi dan kota/kabupaten untuk penyusunan rencana kerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang dengan realisasi pelaksanaannya, untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan target sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang tahun 2025, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kegemaran Membaca;
2. Persentase Perpustakaan yang terakreditasi
3. Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan;
4. Persentase perpustakaan sesuai Standard Nasional Perpustakaan dan berotomasi;
5. Persentase peningkatan penduduk yang teredukasi gemar membaca;
6. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten;
7. Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip;
8. Persentase OPD yang dilakukan Pengawasan Kearsipan
9. Jumlah PD yang membuat daftar arsip dinamis;
10. Persentase arsip tingkat daerah kabupaten yang dapat diakses dalam SIKN melalui JIKN sesuai dengan ketentuan;
11. Persentase Unit Kearsipan yang menjamin keselamatan arsip;
12. Persentase arsip yang teralih media;
13. Nilai Evaluasi SAKIP;
14. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur;
15. Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan;
16. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu;
17. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan;
18. Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dinas perpustakaan dan kearsipan;
19. Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran;
20. Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur;
21. Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah;
22. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik;

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator Kinerja	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)		(10)	
1	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			n/a	65,20 nilai	65,30 nilai	65,40 nilai	n/a	65,20 nilai	65,30 nilai	65,40 nilai	
2	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi			n/a	4 %	4 %	4 %	n/a	4 %	4 %	4 %	
3	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan			9,70 %	9,70 %	9,70 %	9,70 %	9,70 %	9,70 %	9,70 %	9,70 %	
4	Persentase perpustakaan yang sesuai Standard Nasional Perpustakaan dan berotomasi			n/a	50 %	50 %	50 %	n/a	50 %	50 %	50 %	
5	Persentase Peningkatan Penduduk yang tereduksi gemar membaca			n/a	7 %	7 %	7 %	n/a	7 %	7 %	7 %	
6	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten			n/a	69,00 nilai	72,00 nilai	75,00 nilai	n/a	69,00 nilai	72,00 nilai	75,00 nilai	
7	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip			n/a	B (64,10)	B (64,20)	B (64,30)	n/a	B (64,10)	B (64,20)	B (64,30)	
8	Persentase OPD yang dilakukan pengawasan kearsipan			n/a	100 %	100 %	100 %	n/a	100 %	100 %	100 %	
9	Jumlah PD yang membuat daftar arsip dinamis			n/a	5 OPD	5 OPD	5 OPD	n/a	5 OPD	5 OPD	5 OPD	
10	Persentase arsip tingkat daerah kabupaten yang dapat			9,84 %	3,28 %	3,28 %	3,28 %	9,84 %	3,28 %	3,28 %	3,28 %	

No	Indikator Kinerja	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)			(10)
	diakses dalam SIKN melalui JIKN sesuai dengan ketentuan											
11	Persentase Unit Kearsipan yang menjamin keselamatan arsip			1,63 %	1,67 %	1,67 %	1,67 %	1,63 %	1,67 %	1,67 %	1,67 %	
12	Persentase arsip yang teralih media			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
13	Nilai Evaluasi SAKIP			A (80,01)	A (80,01)	A (80,01)	A (80,01)	A (80,01)	A (80,01)	A (80,01)	A (80,01)	
14	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dinas perpustakaan dan kearsipan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
19	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)			(10)
20	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari tabel 2.2 pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 sd 2026 dapat kami jelaskan analisisnya sebagaimana berikut ini :

- Pada tahun 2023 dan 2024 ada beberapa indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2025 dan 2026, sehingga tidak dapat kami sandingkan pencapaian kerjanya. Adapun indikator kinerja yang tidak dapat kami sandingkan pencapaiannya adalah Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat, Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi, Persentase perpustakaan yang sesuai Standard Nasional Perpustakaan dan berotomasi, Persentase Peningkatan Penduduk yang tereduksi gemar membaca, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten, Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip, Persentase OPD dengan nilai pengawasan berkategori baik dan Jumlah PD yang membuat daftar arsip dinamis.
- Pada Dasarnya untuk pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari tahun 2023 sudah dapat tercapai sesuai dengan target Renstra target kinerja Nilai Evaluasi SAKIP dari Target BB (80,01) terealisasi A (81,32).
- Untuk Pencapaian target kinerja pada tahun 2024 dan 2025 kami memproyeksikan indikator kinerja dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.
- Pada Tahun 2024 ini kami mengupayakan pencapaian target kinerja dengan melaksanakan semua kegiatan sesuai rencana anggaran kas dan juga sesuai rencana kerja yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun 2024.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pelaksanaan, dapat dioperasikan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Perencanaan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke

dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pelayanan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan lebih mengedepankan pemanfaatan teknologi/IT.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang sebagai unsur pelayan publik, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pelayanan dengan baik. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan). Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan eksternal. Analisa Internal meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (opportunity) dan peluang (treaths).

Analisis SWOT yang digunakan meliputi factor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisasi/meniadakan hambatan dan ancaman, agar dapat digunakan untuk menganalisa atau menentukan isu-isu strategis yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul terutama dalam perencanaan pelayanan public di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 tahun.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagai salah satu di lingkup kabupaten jombang dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi OPD-OPD yang lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sekaligus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, karena pengelolaan Arsip dan Perpustakaan memegang peran yang sangat penting bagi kelangsungan

hidup dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas–tugas operasional dibidang pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan diperlukan langkah– langkah terobosan untuk mewujudkan manajemen pengelolaan Perpustakaan dan Arsip dengan tertib, efisien dan efektif. Dengan melihat gambaran umum di atas serta memperhatikan kondisi yang berkembang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang saat ini, maka dapat digambarkan kondisi internal organisasi dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat capaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , sebagai berikut :

b. Kondisi Internal Organisasi.

1. Kekuatan (Strength)

- Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang yang ditindak-lanjuti dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang.
- Tersedianya Gedung Perpustakaan dan juga tersedianya gedung sebagai depo arsip.
- Adanya personil untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi yaitu : 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Kepala Bidang Perpustakaan, 1 (satu) orang Kepala Bidang Kearsipan , 1 (satu) orang Kasubbag umum dan kepegawaian dan 1(satu) orang fungsional perencana , 4 (empat) Orang fungsional Pustakawan, 2 (dua) Orang fungsional arsiparis, 8 (delapan) staf PNS, 4 orang staf PPPK dan 16 (tujuh belas) pegawai kontrak.
- Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif.
- Terjalannya sistem koordinasi antar seluruh komponen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang serta lintas SKPD yang harmonis.

2. Kekurangan (Limited)

- Rendahnya minat baca masyarakat;
Rendahnya minat baca masyarakat disebabkan oleh berbagai factor mulai dari memang belum adanya kebiasaan membaca dimasyarakat, kuantitas dan kualitas bahan bacaan yang diterbitkan, sampai pada belum siapnya lembaga

yang seharusnya membudayakan membaca di kalangan masyarakat baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.

- Keterbatasan sarana dan prasarana;
Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan pelayanan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hanya memiliki 1 (satu) mobil operasional, 3 (tiga) mobil perpustakaan keliling, akan tetapi salah satu dari mobil keliling belum bisa dioperasionalkan karena kondisinya kurang bagus dan juga belum ada buku yang dipergunakan untuk layanan. Dalam pelaksanaan pelayanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang khususnya bagian perpustakaan sudah menerapkan otomasi perpustakaan, namun dalam perkembangannya masih diperlukan pengembangan untuk dapat memenuhi kebutuhan baik petugas maupun pemustaka sedangkan bidang kearsipan belum memiliki aplikasi kearsipan seperti Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) serta peralatan pendukungnya. Untuk menjamin keamanan asset buku perpustakaan seharusnya menggunakan pita magnet pengaman buku namun sampai saat ini belum menggunakan karena sarana dan prasarana yang belum mendukung, sebagai contoh harus menggunakan pintu sensor.
- Belum ada regulasi mengenai keanggotaan perpustakaan;
Dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaan belum ada regulasi khusus yang mengatur pemanfaatan perpustakaan meliputi siapa saja yang berhak menjadi anggota perpustakaan dan juga denda keterlambatan pengembalian buku. Regulasi yang belum dijalankan adalah denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan. Regulasi ini dirasa perlu untuk mengurangi angka kehilangan asset buku perpustakaan dan juga menumbuhkan tanggungjawab pemustaka untuk merawat asset buku perpustakaan.
- Belum ada kesadaran mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam di masyarakat;
Dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengamanatkan bahwa setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik Negara maupun swasta yang menghasilkan karya

cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan salinan karyanya tersebut kepada perpustakaan daerah sebagai bentuk pelestarian bahan pustaka untuk dikelola sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan sebagai pemacu pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain keperluan penyebaran informasi.

- Rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip;
Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pencipta arsip yang belum menyadari arsip adalah asset organisasi, dan masih belum memahami peran penting arsip bagi kedudukan organisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tata kelola arsip yang masih jauh dari standar kearsipan, bahkan banyak organisasi yang tidak mengetahui keberadaan arsipnya.
- Belum ada tunjangan khusus bagi pengelola arsip terkait dengan resiko pekerjaan.
Sebagaimana jabatan lain yang sejenis yang memperoleh tunjangan tambahan penghasilan dalam pelaksanaan tugas tambahan terkait dengan resiko pekerjaan, seperti pengelola asset inventaris, pemeriksa barang dan lain-lain. Apalagi bila dilihat dari sisi resiko pekerjaan, pengelola arsip yang telah “berumur”, akan semakin besar kemungkinan resiko yang mengancam. Masih kurangnya perhatian pimpinan untuk meikirkan dan memperjuangkan kondisi ini, sehingga sedikit sekali SDM organisasi yang potensial untuk menjadi pengelola arsip.
- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM utamanya personil yang mempunyai kualifikasi kearsipan dan Perpustakaan dan IT.
- Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip dan perpustakaan.
- Kurangnya dukungan Anggaran yang cukup memadai untuk melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang.
- Kurangnya Koleksi Bahan Pustaka.
- Layanan perpustakaan kepada masyarakat belum merata. Hal ini ditandai dengan kurangnya jumlah perpustakaan yang ada di desa di Kabupaten Jombang. Sampai saat ini, dari 302 desa 4 kelurahan baru ada 49 perpustakaan desa/kelurahan.

- Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan, antara lain perlunya:
 - Pengadaan gedung aula perpustakaan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi perpustakaan;
 - Perbaikan Fasilitas/ sarana dan prasarana yang ada perpustakaan guna meningkatkan kenyamanan pengunjung perpustakaan;
 - Penambahan mobil perpustakaan keliling;
 - Pengadaan motor perpustakaan keliling;
 - Peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan internet di perpustakaan umum daerah dan perpustakaan umum kecamatan;
 - Peningkatan kapasitas gedung depo arsip.
- Tingginya volume pekerjaan yang belum didukung sumber daya manusia yang memadai baik dalam kualitas maupun kuantitas di bidang perpustakaan dan kearsipan, antara lain kurangnya tenaga fungsional pustakawan maupun arsiparis sekaligus nomenklatur jabatannya.
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan arsip maupun perpustakaan. Akibatnya banyak perpustakaan yang belum berjalan dengan baik karena kekurangan bahan pustaka serta SDM pengelola. Di bidang kearsipan, banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di unit-unit kerja karena belum adanya tenaga fungsional arsiparis atau petugas khusus yang menangani kearsipan. Untuk bergerak menuju tujuan yang diharapkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang perlu mengetahui apa yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

b. Kondisi Eksternal Organisasi.

1. Peluang (Opportunity).

- Adanya komitmen Pimpinan Daerah untuk membentuk Lembaga Perpustakaan dan kearsipan.
- Berkembangnya teknologi digital.
- Adanya daerah lain yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip secara modern.

- Adanya Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang ditindak-lanjuti dengan PP Nomor 24 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang ditindak-lanjuti dengan PP Nomor 28 Tahun 2012.
- Berbagai Daerah sudah melaksanakan pelayanan perpustakaan berbasis IT.

2. Ancaman (threatment).

- Kemungkinan adanya intervensi dari berbagai kelompok kepentingan akan dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.
- Kemungkinan terjadinya musibah baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun akibat ulah manusia merupakan ancaman terjadinya kerusakan dan hilangnya arsip dan barang daerah.
- Masih banyak Aparatur maupun SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang kurang paham akan arti penting pengelolaan arsip secara tertib.
- Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membaca.

2. Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Ke Depan.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jombang tidak bisa terlepas dari kondisi saat ini. Kedepan, Perpustakaan daerah dan arsip daerah akan terus tumbuh dan berkembang secara akumulatif seiring dengan semakin meningkatnya volume dan kompleksitas Tugas dan fungsi Organisasi. Untuk itu dengan semakin meningkatnya volume arsip dan Buku Perpustakaan memerlukan pengelolaan yang tepat, sehingga dapat tercipta efektifitas, efisiensi, produktifitas dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang. Untuk mencapai tujuan / kondisi yang diinginkan tersebut diperlukan :

- Keseragaman, kontinuitas dan keterpaduan dalam pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan dan Arsip daerah mulai dari tahap pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sampai dengan tahap penghapusan arsip daerah.
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- Sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi standart mutu.

- Pembinaan dan pelatihan yang terus menerus sehingga terpenuhi tenaga pengelola Perpustakaan dan arsip yang memadai. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan komitmen, program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang dan terciptanya berbagai jenis perpustakaan (Perpustakaan Umum, Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah) yang sesuai standard.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, maka fungsi dan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait erat dengan pencapaian Sasaran **ke-satu** yaitu "*Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan*" dan **Sasaran kedua** "*Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi*",

Dalam rangka untuk mewujudkan msasaran tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menentukan target program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang tahun 2024 s/d 2026 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah. Adapun Review

terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Jombang kami sajikan dalam tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Jombang

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan
1	2		3	5	6	7			8	9	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Kab Jombang	Persentase ketermanfaatan perpustakaan	9,70%	675.913.100	Program Pembinaan Perpustakaan	Kab Jombang	Persentase ketermanfaatan perpustakaan	9,70%	419.887.838	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Jombang	Persentase perpustakaan yang ber Standard Nasional Perpustakaan	50%	345.087.600	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Jombang	Persentase perpustakaan yang ber Standard Nasional Perpustakaan	50%	270.371.838	
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab Jombang	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 per pust	171.906.100	Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab Jombang	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 per pust	166.777.038	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Dengan Standart Nasional Perpustakaan	Kab Jombang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	47 per pust.	39.347.600	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Dengan Standart Nasional Perpustakaan	Kab Jombang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	47 per pust.	36.787.600	
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab Jombang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 eksemplar	133.833.900	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab Jombang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200 eksemplar	66.827.200	

2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Jombang	Persentase peningkatan penduduk yang tereduksi gemar membaca	7%	330.325.500	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Jombang	Persentase peningkatan penduduk yang tereduksi gemar membaca	7%	149.516.000	
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kab Jombang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	232 lokus	227.565.500	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kab Jombang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	232 lokus	96.786.900	
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab Jombang	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 per pust	103.260.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab Jombang	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 per pust	52.729.100	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Kab Jombang	Persentase OPD dengan nilai pengawasan kearsipan berkategori baik	100%	790.615.250	Program Pengelolaan Arsip	Kab Jombang	Persentase OPD dengan nilai pengawasan kearsipan berkategori baik	100%	233.638.450	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kab Jombang	Jumlah OPD yang membuat daftar arsip dinamis	5 OPD	717.960.500	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota	Kab Jombang	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	5 OPD	192.064.200	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab Jombang	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	300 berkas	481.607.800	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab Jombang	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	300 berkas	142.463.000	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab Jombang	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	9684 berkas	236.352.700	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab Jombang	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	9984 berkas	49.601.200	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Jombang	Persentase Arsip Tingkat Daerah Kabupaten yang Dapat Diakses Melalui JIKN sesuai dengan ketentuan	3,28%	72.654.750	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Jombang	Persentase Arsip Tingkat Daerah Kabupaten yang Dapat Diakses Melalui JIKN sesuai dengan ketentuan	3,28%	41.574.250	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/ Kota Melalui JIKN	Kab Jombang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 pengguna	72.654.750	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/ Kota Melalui JIKN	Kab Jombang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 pengguna	41.574.250	

2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kab Jombang	Persentase unit kearsipan yang menjamin keselamatan arsip	1,67%	22.744.800	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kab Jombang	Persentase unit kearsipan yang menjamin keselamatan arsip	1,67%	16.141.000	
2.24.03.2.04	Authentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota	Kab Jombang	Persentase arsip yang Teralih Media	100%	22.744.800	Authentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota	Kab Jombang	Persentase arsip yang Teralih Media	100%	16.141.000	
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Kab Jombang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 arsip	22.744.800	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Kab Jombang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 arsip	16.141.000	
2.24.01	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kab Jombang	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	4.322.140.341	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kab Jombang	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	4.328.098.212,50	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Jombang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	29.744.600	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Jombang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	24.564.600	
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	14.086.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	12.558.600	
2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	15.086.000	koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	12.006.000	
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Jombang	Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	100%	3.432.695.441	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Jombang	Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	100%	3.466.464.628,50	
		Kab Jombang	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Sesuai Aturan	100%			Kab Jombang	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Sesuai Aturan	100%		
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	3.309.855.191	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	3.343.624.378,5	

2.24.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.000.150	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.000.150	
2.24.01.2.02.0005	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	120.840.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	120.840.000	
2.24.01.2.02.0007	Koor dinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Kab Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17 laporan	1.000.100	Koor dinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Kab Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17 laporan	1.000.100	
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Jombang	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100%	12.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Jombang	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100%	12.000.000	
2.24.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab Jombang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	36 paket	12.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab Jombang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	20 paket	12.000.000	
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Jombang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Adimistrasi Perkantoran	100%	213.123.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Jombang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Adimistrasi Perkantoran	100%	202.815.550	
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	7.183.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	6.155.100	
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Kab Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	15.254.100	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Kab Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58 paket	13.610.300	
2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Jombang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 paket	13.607.700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Jombang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 paket	13.607.700	

2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	95.294.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	90.376.400	
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	11.640.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	8.923.050	
2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	2.352.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	2.352.000	
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	67.791.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	67.791.000	
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Jombang	Persentase Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	186.849.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Jombang	Persentase Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	13.180.000	
2.24.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Jombang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	186.849.200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Jombang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	13.180.000	
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Jombang	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	196.928.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Jombang	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	208.728.400	
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Kab Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	91.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Kab Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	78.000.000	
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	105.728.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	130.728.400	
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	250.799.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	150.565.584	

2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.110.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	30.457.584	
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	171.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	103.800.000	
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	17.029.600	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	4.978.000	
2.24.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 unit	22.660.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 unit	11.330.000	
					5.412.006.441					4.747.986.050,5	

Dari Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD kabupaten Jombang Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan kearsipan dititikberatkan pada kegiatan peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta menyiapkan sarana dan prasaran penunjang. Program kerja Dinas perpustakaan dan Kearsipan ini untuk menunjang tema pembangunan kabupaten jombang pada tahun 2025. Pada saat penganggaran kita sudah menelaah semua kebutuhan diperlukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan guna menunjang perwujudan visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mendukung tema pembangunan tahun 2025.

2.5 . Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pembahasan Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Jombang mencakup penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan juga berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan serta merangkum referensi kebutuhan informasi dari masyarakat, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah di Kabupaten jombang. Dari hasil tersebut ternyata tidak ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang. Sehingga kami tidak dapat menyajikan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan pada tahun 2024 yang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Jombang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>=====NIHIL=====</p> </div>					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam upaya melaksanakan Tugas dan Fungsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Rencana Kerja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada arah dan kebijakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

3.1.1. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

Adapun Arah Kebijakan Perpustakaan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Budaya Baca dan Literasi
2. Pengarus-utamaan Naskah Nusantara
3. Standardisasi dan Pembinaan Perpustakaan
4. Penguatan Kemitraan Lembaga dan Sinkronisasi Sistem Informasi Layanan Terpadu.

Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah *"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi"* dengan **Misi** *"Meningkatkan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, pelayanan prima perpustakaan, dan pelestarian bahan pustaka dan naskah Nusantara"*

Tujuan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah *"Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat"*. Sedangkan **Sasaran Strategisnya** adalah *"Terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca*

masyarakat", dengan indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

3.1.2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Adapun Arah Kebijakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepatuhan lembaga pemerintah dan lembaga publik terhadap kebijakan kearsipan;
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional;
3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima; dan
4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI.

Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah *"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi"* dengan **Misi** *"Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa"* dan *"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien dan terpercaya"*.

Tujuan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah *"Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip"*. Sedangkan **Sasaran Strategisnya** adalah

1. *"Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan"* dengan indikator *Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan"* Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) kebijakan kearsipan, (b) kapabilitas penyelenggara kearsipan, (c) pelayanan dan fasilitasi kearsipan, (d) akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.

2. *"Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional"* dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip. Indeks Ketersediaan Arsip mengukur tingkat ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) penciptaan dan akuisisi arsip, (b) penataan dan pengolahan arsip, (c) preservasi arsip.
3. *"Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima"* dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan. Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip, (b) penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan, (c) pengelolaan data dan informasi kearsipan.
4. *"Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI"* dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat dan daerah.

3.1.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelarasan antara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Mendasar hal tersebut, maka ditetapkan tema RKPD Tahun 2025 adalah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan".

Melalui tema tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2025, yang diwujudkan dengan langkah-langkah konkret melalui program prioritas pembangunan, yakni:

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;

2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
4. Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan;
5. Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;
6. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan;
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan mendorong pemberdayaan Pemerintahan Desa;
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi.
9. Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

Guna mengukur keberhasilan pembangunan tahun 2025 oleh Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan target sasaran makro sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Pertumbuhan Ekonomi | : 4,95% - 5,20% |
| 2. Persentase penduduk miskin | : 9,95% - 9,75% |
| 3. Indeks Gini | : 0,3870 – 0,3650 |
| 4. Indeks Pembangunan Gender | : 92,27 – 94,47 |
| 5. Indeks Pembangunan Manusia | : 75,7 – 75,79 |
| 6. Tingkat Pengangguran Terbuka | : 5,11 – 3,53 |
| 7. Indeks Reformasi Birokrasi | : 81 – 83 |
| 8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | : 69,59 |
| 9. Indeks Resiko Bencana | : 107,26 – 106,26 |

Sedangkan Program Prioritas Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memori Kolektif Bangsa;
2. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
3. Penguatan Bunda Literasi melalui Literasi Keluarga Menuju Indonesia Emas;
4. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);

5. Disaster Management for Library and Archives;
6. Peran serta masyarakat dalam meningkatkan literasi menuju kesejahteraan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang didasari atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang dirumuskan dengan berdasarkan pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 sebagaimana telah dijabarkan pula dalam Rancangan RKPD Tahun 2025. Adapun tema pembangunan kabupaten jombang tahun 2025 adalah "*Hilirisasi Agrobisnis*" dengan prioritas pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan yang Harmonis;
2. Peningkatan Layanan Publik dan Tata kelola Pemerintahan yang Berkualitas;
3. Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dan merata..

Dan untuk mewujudkan tema dan prioritas pembangunan tersebut, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang Tahun 2025, yaitu:

Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang adalah

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.
2. Meningkatkan Kegemaran membaca masyarakat dalam mendukung mutu pendidikan.

Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Pengelolaan Arsip;
2. Meningkatnya Fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.

3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Serta dalam Proses Perencanaan Pembangunan/ Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang sudah melaksanakan/mengakomodasi kepentingan Pengarusutamaan Responsive Gender (PPRG).

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor – Faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam Rangka mewujudkan Tujuan RPD Kabupaten Jombang tahun 2025 "*Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing*" dan "*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik*" serta mencapai Sasaran yaitu "*Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan*" dan Sasaran kedua "*Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi*", maka untuk mendukung mewujudkan Tujuan dan Sasaran tersebut akan diwujudkan melalui 1 (satu) Program Urusan Perpustakaan, 2 (dua) Program Urusan Kearsipan dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jadi secara keseluruhan ada 4 (empat) program yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025, adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan.

Program Pembinaan Perpustakaan ini terdiri dari dua kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dan kegiatan Pembudayaan Kegemaran membaca Tingkat Daerah Kabupaten/kota. Rencana kerja yang dilakukan dalam program Pembinaan Perpustakaan ini adalah melakukan pembinaan perpustakaan sekolah/desa, memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat, pengembangan koleksi serta melakukan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dengan melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat.

2. Program Pengelolaan Arsip.

Disetiap perkantoran, arsip merupakan suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan pengelolaan arsip secara baik agar ketika suatu saat dibutuhkan akan lebih mudah untuk mencari. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, arsip ada tiga macam yaitu arsip dinamis dan arsip statis dan arsip terjaga dimana masing-masing jenis arsip tersebut memerlukan pengelolaan yang berbeda.

A. Arsip Dinamis

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Arsip Dinamis memerlukan pengelolaan yang baik sebagai bahan bukti dasar untuk mengambil suatu keputusan, sekaligus sebagai alat ukur dari melakukan sebuah kegiatan. Pengelolaan arsip dinamis meliputi:

- Arsip vital, merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- Arsip Aktif, merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- Arsip Inaktif, merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

B. Arsip Statis

Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

C. Arsip Terjaga

Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Program ini merupakan suatu kegiatan untuk mengamankan, menyelamatkan, dan memulihkan arsip dari kerusakan, hilang atau musnah baik secara fisik maupun informasi yang diatur melalui suatu prosedur tetap.

Adapun Tujuan Penyelenggaraan Kearsipan adalah:

- Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
- Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Berikut ini langkah-langkah mengelola arsip yang baik agar tujuan penyelenggaraan kearsipan dapat terwujud :

- Memilah arsip yang sudah tidak bermanfaat, bermanfaat dan sangat bermanfaat. Arsip yang sudah tidak memiliki manfaat sebaiknya dimusnahkan.
- Setelah melakukan pemilahan arsip di pisahkan lagi berdasarkan jenis arsip, tahun pembuatan dan pembuat arsip.
- Arsip dimasukkan kedalam sebuah wadah biar lebih rapi, misalnya stopmap, ordner dan lain-lainnya.
- Menempatkan arsip-arsip yang sudah tertata baik ke dalam suatu tempat yang aman atau disebut juga gudang arsip.
- Membuat pencatatan tersendiri terkait arsip tersebut, hal ini juga membuat kita lebih mudah dalam pencarian ketika kita membutuhkan arsip tersebut.

4. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 ada 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh), adapun rinciannya program/kegiatan/sub kegiatan, indikator dan pagu anggarannya adalah sebagai berikut :

I. Program Pembinaan Perpustakaan

1. Kegiatan Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota.

Input Rp. 166.777.038,-

Output Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/kota sesuai standard nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Outcome Persentase Perpustakaan sesuai Standard Nasional

Perpustakaan dan Berotomasi

- b. Sub Kegiatan Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standard nasional perpustakaan.

Input : Rp. 36.767.600,-

Output : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan

Outcome : Persentase Perpustakaan sesuai Standard Nasional Perpustakaan dan Berotomasi

- c. Sub Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka.

Input : Rp. 66.827.200

Output : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan

Outcome : Persentase Perpustakaan sesuai Standard Nasional Perpustakaan dan Berotomasi

2. Kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.

- a. Sub Kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat.

Input : Rp. 96.786.900,-

Output : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan

Outcome : Persentase Peningkatan Pensusuk yang Tereduksi Gemar Membaca

- b. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Input : Rp. 52.729.100,-

Output : Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan

Outcome : Persentase Peningkatan Pensusuk yang Tereduksi Gemar Membaca

II. Program Pengelolaan Arsip

1. Kegiatan Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota.

a. Sub Kegiatan Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis.

Input : Rp. 142.463.000,-

Output : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan

Outcome : Jumlah OPD yang membuat daftar arsip dinamis

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis

Input : Rp. 49.601.200,-

Output : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan

Outcome : Jumlah OPD yang membuat daftar arsip dinamis

2. Kegiatan Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota

c. Sub Kegiatan Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN.

Input : Rp. 41.574.250,-

Output : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN

Outcome : Persentase arsip tingkat daerah kabupaten yang dapat diakses dalam SIKN melalui JIKN sesuai dengan ketentuan

III. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

1. Kegiatan Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota

a. Sub Kegiatan Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip.

Input : Rp. 16.141.000,-

Output : Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan

penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip.

Outcome : Persentase arsip yang teralih media

IV. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Input : Rp. 12.558.600,-

Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Outcome : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Input : Rp. 12.006.000,-

Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Outcome : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun sesuai aturan.

2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah.

a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Input : Rp. 3.343.624.378,50,-

Output : Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN.

- Outcome : 1). Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu.
2). Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- Input : Rp. 120.840.000,-
- Output : Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
- Outcome : 1). Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu.
2). Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
- Input : Rp. 1.000.150,-
- Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- Outcome : 1). Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu.
2). Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
- Input : Rp. 1.000.100,-
- Output : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- Outcome : 1). Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN

tepat waktu.

2). Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Input : Rp. 12.000.000,-

Output : Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan.

Outcome : Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian dinas perpustakaan dan kearsipan.

4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Input : Rp. 6.155.100,-

Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Outcome : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

Input : Rp. 13.610.300,-

Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Outcome : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Input : Rp. 13.607.700,-

Output : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

- Outcome : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
- Input : Rp. 90.376.400,-
- Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- Outcome : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- f. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Input : Rp. 8.923.050,-
- Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
- Outcome : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- g. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
- Input : Rp. 2.352.000,-
- Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
- Outcome : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Input : Rp. 67.791.000,-
- Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Outcome : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
5. Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

- a. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
 - Input : Rp. 13.180.000,-
 - Output : Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.
 - Outcome : Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik
 - Input : Rp. 78.000.000,-
 - Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
 - Outcome : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 - Input : Rp. 130.728.400,-
 - Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
 - Outcome : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah.
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - Input : Rp. 30.457.584,-
 - Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
 - Outcome : Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- Input : Rp. 103.800.000,-
- Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
- Outcome : Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- Input : Rp. 4.978.000,-
- Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
- Outcome : Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- Input : Rp. 11.330.000,-
- Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
- Outcome : Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada Bab II tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025 bahwa Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 sudah sesuai dengan Rancangan awal RKPD Kabupaten Jombang. Dari Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD kabupaten Jombang Tahun 2025 tersebut dapat dilihat bahwa apa yang direncanakan pada rancangan awal tidak ada perubahan nilai anggaran dengan hasil analisis kebutuhan yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Berikut ini kami sajikan dalam Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan Maju Tahun 2026.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan	Kab Jombang	9,70 %	419.887.838		9,70 %	812.761.000
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai Standard Nasional Perpustakaan dan Berotomasi	Kab Jombang	50,00 %	270.371.836		50,00 %	471.935.500
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten /kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kab Jombang	3 perpustakaan	166.777.036		3 perpustakaan	233.056.700
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Dengan Standart Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab Jombang	47 perpustakaan	36.767.600		47 perpustakaan	73.878.800
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kab Jombang	200 eksemplar	66.827.200		500 eksemplar	165.000.000
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penduduk yang tereduksi gemar membaca	Kab Jombang	7,00%	149.518.000		7,00%	340.825.500
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kab Jombang	200 lokus	96.786.900		232 lokus	227.565.500
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab Jombang	3 perpustakaan	52.729.100		3 perpustakaan	113.260.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang dilakukan pengawasan kearsipan	Kab Jombang	100%	233.638.450		100%	790.615.250
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota	Jumlah OPD yang membuat daftar arsip dinamis	Kab Jombang	5 OPD	192.064.200		5 OPD	717.960.500
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kab Jombang	300 berkas	142.463.000		300 berkas	481.607.800
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kab Jombang	9984 berkas	49.601.200		10284 berkas	236.352.700
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Tingkat Daerah Kabupaten yang Dapat Diakses Melalui JIKN sesuai dengan ketentuan	Kab Jombang	3,28%	41.574.250		3,28%	72.654.750
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/ Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kab Jombang	10 pengguna	41.574.250		10 pengguna	72.654.750
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase unit kearsipan yang menjamin keselamatan arsip	Kab Jombang	1,67%	16.141.000		1,67%	34.040.000
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih media kabupaten/kota	Persentase arsip yang teralih media	Kab Jombang	100%	16.141.000		100%	34.040.000
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjamin keabsahan arsip	Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Kab Jombang	10 arsip	16.141.000		10 arsip	34.040.000
2.24.01	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	Kab Jombang	100%	4.878.318.762,50		100%	4.322.140.341
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	Kab Jombang	100%	24.564.600		100%	29.744.600
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Jombang	3 dokumen	12.558.600		3 dokumen	14.086.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.24.01.2.01.0006	koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Jombang	5 laporan	12.006.000		5 laporan	15.086.000
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Kab Jombang	100%	3.466.454.628,50		100%	3.432.695.441
		Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Sesuai Aturan		100%			100%	
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Jombang	24 orang/bulan	3.343.624.378,50		24 orang/bulan	3.309.855.191
2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Jombang	1 laporan	1.000.150		1 laporan	1.000.150
2.24.01.2.02.0006	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Jombang	12 dokumen	120.840.000		12 dokumen	120.840.000
2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab Jombang	17 laporan	1.000.100		17 laporan	1.000.100
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kab Jombang	100%	12.000.000		100%	12.000.000
2.24.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab Jombang	20 paket	12.000.000		20 paket	12.000.000
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab Jombang	100%	202.815.550		100%	213.123.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pake Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Jombang	12 paket	6.155.100		13 paket	7.183.900
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Jombang	58 paket	13.610.300		57 paket	15.254.100
2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab Jombang	30 paket	13.607.700		33 paket	13.607.700
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Jombang	3 paket	90.376.400		5 paket	95.294.400
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Jombang	2 paket	8.923.050		2 paket	11.640.000
2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab Jombang	1 dokumen	2.352.000		1 dokumen	2.352.000
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Jombang	24 laporan	67.791.000		24 laporan	67.791.000
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Jombang	100%	13.180.000		100%	186.849.200
2.24.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab Jombang	1 unit	13.180.000		5 unit	186.849.200
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Jombang	100%	208.728.400		100%	196.928.400
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Jombang	12 laporan	78.000.000		12 laporan	91.200.000
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Jombang	12 laporan	130.728.400		12 laporan	105.728.400
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kab Jombang	100%	150.565.584		100%	250.799.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Jombang	1 unit	30.457.584		1 unit	40.110.088
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Jombang	12 unit	103.800.000		12 unit	171.000.000
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab Jombang	3 unit	4.978.000		3 unit	17.029.600
2.24.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab Jombang	34 unit	11.330.000		27 unit	22.660.000
TOTAL					4.835.712.247			5.412.006.441

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mulai membuat rencana aksi agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang direncanakan dengan realisasi anggaran yang ada. Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkauan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan

kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang didasarkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah terinci dan terencana dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dimana nama program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya telah disesuaikan dengan permendagri nomor 90 tahun 2019, Kepmendagri 050-5889/2021 serta Kemendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang pada tahun 2025 sejumlah 4 program, 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Sub kegiatan-sub kegiatan tersebut akan dilaksanakan untuk menunjang administrasi umum serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang yang dilaksanakan di Kabupaten Jombang. Sumber pendanaan seluruh kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Adapun program, kegiatan, sub kegiatan indikator, kelompok sasaran, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dijelaskan secara terperinci sebagaimana Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Usulan Program, Kegiatan dan Pendanaan pada Rencana Kerja tahun 2025

Kode Rek.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target Renja 2025		Ket
			K	Rp	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Ketermanfaatkan Perpustakaan	9,70 %	419.887.838	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan sesuai Standard Nasional Perpustakaan dan berotomasi	50,00 %	270.371.836	
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 perpustakaan	166.777.036	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Dengan Standart Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	47 perpustakaan	36.767.600	
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200 eksemplar	66.827.200	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penduduk yang Teredukasi Gemar Membaca	7,00%	149.518.000	
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	200 lokus	96.786.900	
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 perpustakaan	52.729.100	
2.24.01	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	4.878.318.762,50	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	24.564.600	
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	12.558.600	
2.24.01.2.01.0006	koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 laporan	12.006.000	

Kode Rek.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target Renja 2025		Ket
			K	Rp	
	SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	3.466.454.628,50	
		Persentase Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%		
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	3.343.624.378,50	
2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	120.840.000	
2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.000.150	
2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	1.000.100	
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perkantoran	100%	12.000.000	
2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 paket	12.000.000	
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	202.815.550	
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	6.155.100	
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58 paket	13.610.300	
2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 paket	13.607.700	
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	90.376.400	

Kode Rek.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target Renja 2025		Ket
			K	Rp	
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	8.923.050	
2.24.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.352.000	
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	67.791.000	
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Sarana dan prasarana Aparatur	100%	13.180.000	
2.24.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	13.180.000	
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	208.728.400	
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	78.000.000	
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	130.728.400	
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	150.565.584	
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	30.457.584	
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	103.800.000	
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	4.978.000	
2.24.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 unit	11.330.000	

Kode Rek.	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target Renja 2025		Ket
			K	Rp	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang dilakukan pengawasan kearsipan	100%	233.638.450	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota	Jumlah PD yang membuat daftar arsip dinamis	5 OPD	192.064.200	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	300 berkas	142.463.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	9984 berkas	49.601.200	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Tingkat Daerah Kabupaten yang Diakses dalam SIKN Melalui JIKN sesuai dengan ketentuan	3,28%	41.574.250	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/ Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 pengguna	41.574.250	
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Unit Kearsipan yang Menjamin Keselamatan Arsip	1,67%	16.141.000	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaen/Kota	Persentase arsip Teralih Media	100%	16.141.000	
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 arsip	16.141.000	
Jumlah Anggaran				4.835.712.247	

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 mencakup tiga bahasan yaitu :

- a. Catatan Penting Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat desa hingga Musrenbang tingkat Kecamatan. Sehingga akhirnya dapat disusun rincian kebutuhan anggaran/ pagu anggaran sesuai skala prioritas dan usulan-usulan yang masuk. Pagu anggaran dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten jombang tidak sama besarnya dengan pagu anggaran pada rancangan awal rencana kerja, hal ini dikarenakan adanya pengurangan anggaran dikarenakan untuk penanganan program-program prioritas.
- b. Kaidah Pelaksanaan Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

- c. Rencana Tindak lanjut Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Ada beberapa hal yang perlu yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang :
1. Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat yang representatif.
 2. Perlu adanya tambahan SDM yang memiliki kompetensi di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 3. Perlu adanya inovasi-inovasi guna mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dalam urusan kearsipan maupun urusan perpustakaan.

Upaya pembangunan/perbaikan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan serta sub kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang dan seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian rencana kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025.

Jombang, 10 Juli 2024

Pih. KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN JOMBANG



KOMARIYAH, SH

Pembina

NIP. 19670416 199003 2 014